

RENCANA KERJA PERUBAHAN

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**

JL.R.AGIL KUSUMADYA NO.44 TELP (0291) 435111KUDUS 59343

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021	5
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	9
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	
Tabel 2.1 Laporan Evaluasi Hasil Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021	
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2021	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2021, tujuan sasaran, program dan kegiatan tahun 2021. Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Kudus, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami sangat menyadari bahwa Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja pada tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kudus,

2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680703 198803 2 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 merupakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi/perkiraan pelayanan, kondisi/kebutuhan mendesak yang berdampak pada pagu indikatif (bertambah atau berkurang), target kinerja, atau menambah ataupun mengurangi kegiatan dan juga merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategik dari masing masing SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 diawali dengan koordinasi antar bidang – bidang yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Dalam rangka efektif serta efisien perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD kabupaten Kudus Tahun 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang dipakai dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah memberikan isi pada Program Pembangunan Daerah yang termuat dalam Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023
2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja
 - a. Memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Guna memberikan arah pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar Pertimbangan Perubahan :

Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan anggaran pada kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah untuk memenuhi kegiatan yang mengalami penambahan volume pada Honor Tenaga Kontrak, Asuransi Ketenagakerjaan, Penyesuaian Honor PHD, Penambahan kapasitas internet, Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Kabupaten Kudus, DED Pembangunan Gedung Fraksi, Pemeliharaan Sarana Prasarana, Pembahasan Ranperda, Penambahan volume reses, Pengkajian Tunjangan Perumahan DPRD dan Fasilitasi Rapat koordinasi Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus hingga triwulan II tahun 2021 dan dilakukan analisa per urusan.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat usulan dan revisi kegiatan perubahan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hal –hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus hingga Triwulan II Tahun 2021

A. Program/kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada :

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mengalami refocusing anggaran sehingga Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami refocusing anggaran sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada :

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD :

Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0% disebabkan karena kegiatan menyesuaikan kebutuhan DPRD pada kebutuhan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli /bersifat insidental.

b. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD :

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran 0% karena pelaksanaan kegiatan direncanakan pada triwulan berikutnya dan menyesuaikan kebijakan PPKM.

B. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada :

a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja:

(1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah capaian kinerja sudah memenuhi target dan capaian realisasi anggaran sebesar 37,32 %.

(2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja sudah memenuhi target dan capaian realisasi anggaran sebesar 18,15%

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

(1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah memenuhi target capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran sebesar 46,07%.

(2) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD sudah memenuhi target capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 49,44%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah:

Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sudah mencapai target kinerja dan realisasi anggaran sebesar 33,11%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah mencapai target kinerja dan realisasi anggaran sebesar 47,87%.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah tercapai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 49,83%.

(3) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga telah mencapai target kinerja dan realisasi anggaran sebesar 32,65%.

(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sudah memenuhi target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 26,32%.

(5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan telah mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 37,11%.

(6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah memenuhi target kegiatan dan realisasi anggaran sebesar 17,15%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah memenuhi target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 25,66%.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sudah sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 30,46%.

(3) Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor telah sesuai target kinerja dan realisasi anggaran sebesar 47,40%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan telah sesuai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 23,68%.

(2) Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel sudah tercapai target dengan realisasi anggaran sebesar 7,45%.

(3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sudah tercapai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 42,60%.

- (4) Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target kinerja telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 37,79%.
- g. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD :
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD telah tercapai target kinerja dan realisasi anggaran sebesar 47,49%.
- h. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD :
Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD target kegiatan telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 10,03%.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD :
- (1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah target kegiatan telah tercapai dan realisasi anggaran sebesar 35,05%.
- (2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan target kegiatan telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 89,18%.
- (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan /atau Naskah Akademik target kegiatan telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 98,04%
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran:
Sub Kegiatan Pembahasan APBD target kinerja telah tercapai dan realisasi anggaran sebesar 31,69%.
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan:
- (1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum target kegiatan telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 27,89%.
- (2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur target kegiatan tercapai dan realisasi anggaran 29,23%.
- (3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat target kegiatan telah tercapai dan realisasi anggaran sebesar 27,39%.
- (4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian target capaian telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 30,05%.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD:
- (1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD capaian kinerja tercapai dan realisasi anggaran sebesar 85,81%.
- (2) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan capaian kinerja telah tercapai dan realisasi anggaran sebesar 46,03%.
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi capaian kinerja telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 36,64%.

- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat:
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses target kinerja telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 46,39%.
 - f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD :
Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD target kinerja telah tercapai realisasi anggaran sebesar 15,06%.
 - g. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD :
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah capaian kinerja telah terpenuhi dengan realisasi anggaran sebesar 27,19%.
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD capaian kinerja terpenuhi dan realisasi anggaran sebesar 23,70%.
- C. Faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan antara lain :
- Adanya kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan situasi masa pandemi dengan aturan PPKM
 - Adanya Efisiensi dan Refocusing anggaran
- D. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut dengan:
melakukan koordinasi antar bagian yang terkait terhadap kegiatan yang belum memenuhi target di atas .

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus hingga Triwulan II Tahun 2021 tersaji pada tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021. Rencana program dan kegiatan Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 terdapat sebanyak 2 Program dengan 17 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Adapun uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Pengadaan Mebel
 - 6.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.2. Pemeliharaan Mebel
 - 8.3. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - 8.4. Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 10. Layanan Administrasi DPRD
 - 10.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

KEGIATAN :

- 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 1.1 Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 1.4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.1. Pembahasan APBD
- 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 4.1. Bimbingan Teknis DPRD
 - 4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 4.3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 4.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 5.2. Pelaksanaan Reses
- 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas DPRD

7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

7.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

7.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus terdapat revisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan karena adanya aplikasi SIPD dari pusat. Program kegiatan pada saat RKPD awal terdapat 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Layanan dan Administrasi Keuangan
3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Perubahan Program pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 menjadi 2 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Kegiatan pada saat RKPD awal sebanyak 13 kegiatan sedangkan pada RKPD Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebanyak 17 kegiatan.

Untuk sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada RKPD Awal sebanyak 52 sub kegiatan dan pada RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dan RKPD Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebanyak 43 sub kegiatan.

Data perubahan Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bisa dilihat pada **Tabel 3.1.**

Adapun Rencana dan Program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mengalami penambahan pagu anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pagu Awal RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebesar Rp.58.883.785.000 dan Pagu Perubahan RKPD Sekretariat DPRD tahun 2021 sebesar Rp. 65.866.518.749,-.

Dari Pagu awal RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.982.733.749 atau sebesar 11,86% sesuai dengan pagu yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Layanan dan Administrasi Keuangan anggaran pada RKPD awal Tahun 2021 sebesar Rp.41.844.445.000 dan pagu anggaran RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebesar Rp.47.163.936.149 atau mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.5.319.491.149,- atau

sebesar 12,71% . Kenaikan anggaran pada Program ini karena kebutuhan anggaran rutin yang dibutuhkan dan adanya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kudus.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Kudus pada RKPD awal sebesar Rp. 17.039.340.000,- dan pada RKPD Tahun 2021 serta RKPD perubahan Tahun 2021 sebesar Rp. 18.702.582.600,- atau mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 1.663.242.600,- atau sebesar 9,761 %. Kenaikan anggaran pada Program ini karena menyesuaikan Kebutuhan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kudus pada tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 akan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan, dan juga sebagai acuan kegiatan dan indikator pengukuran kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagai bagian dari instansi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Rencana Kerja perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Disamping hal tersebut Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2021 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Kudus, 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680703 198803 2 009

LAMPIRAN – LAMPIRAN

TABEL 2.1
LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Periode Pelaksanaan : 2021
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I		II		III		IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			48.845.864	9.036.289	6.369.576	0	0			15.405.865			31,54	
		indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83 Indeks	0	86	0	0	86						103,61	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			34.425	3.805	1.132	0	0	4.937	14
		<i>Jumlah dokumen renstra dan renja yang tersusun, dokumen evaluasi, dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Perangkat Dearah</i>	26 dok	7	2	0	0	9	34,62	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31.352	3.645	838	0	0	4.483	14,3
		Jumlah dokumen renstra dan renja yang tersusun	4 dok	1	1	0	0	2	50	
		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	5 dok	0	0	0	0	0	0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket		
					I		II		III		IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	14 dok		4		1		0		0		5		35,71	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.073		160		294		0		0		453		14,75
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen		2		0		0		0		2		66,67	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.622.343		1.075.384		871.548		0		0		1.946.932		35
		Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar	52 dok		13		13		0		0		26		50	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.617.108		1.073.343		871.267		0		0		1.944.610		34,62

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	
		Jumlah penerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	30	0	0	0	30	88,24	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.235	2.041	281	0	0	2.322	44,36	
		Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	12 dokumen	3	3	0	0	6	50	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		151.000	50.000	0	0	0	50.000	33	
		Jumlah aset kantor yang terbayar	2 unit	1	0	0	0	1	50	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		151.000	50.000	0	0	0	50.000	33,11	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket	
					I		II		III		IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
		Jumlah aset kantor yang terbayar	2 unit		1		0		0	0		1		50	
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			429.589		0		0	0	0		0		0	
		<i>Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat kinerja aparatur dan implementasi perundang undangan</i>	57 orang		0		0		0	0		0		0	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			144.500		0		0	0	0		0		0	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai kinerja aparatur	34 orang		0		0		0	0		0		0	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis			285.089		0		0	0	0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai implementasi per UUan	19 orang	0	0	0	0	0	0	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.167.364	185.184	95.357	0	0	280.541	24	
		Jumlah kegiatan penyediaan administrasi umumprangkat daerah yang terealisasi	7 kegiatan	7	5	0	0	12	171,43	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		24.399	7.164	3.566	0	0	10.730	43,98	
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	23 jenis	13	6	0	0	19	82,61	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			248.941	69.959	41.200	0	0	111.159	44,65
		Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor	71 jenis	55	2	0	0	57	80,28	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			68.289	6.813	4.644	0	0	11.457	16,78
		Jumlah peralatan Rumah Tangga	9 jenis	3	1	0	0	4	44,44	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			474.802	66.001	31.724	0	0	97.725	20,58
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman	8 jenis	8	8	0	0	16	200	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			34.748	0	0	0	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	0	2	0	0	2	33,33	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			53.400	9.870	5.850	0	0	15.720	29,44
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3	0	0	0	3	100	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			262.784	25.377	8.373	0	0	33.750	12,84
		Jumlah kegiatan perjalanan dinas	30 kali	5	2	0	0	7	23,33	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.031.288	0	0	0	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I	II	III	IV		9=5+6+7+8	10=11/6*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	
		Jumlah pengadaan gedung/sarpras kantor yang terealisasi	2 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			31.288	0	0	0	0	0	0	0	
		jumlah pengadaan sarpras kantor	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah pembangunan gedung kantor	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.023.559	436.885	240.214	0	0	677.099		33	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket	
					I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8		10=11/6*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		<i>Jumlah penyediaan jasa surat, komunikasi sumber daya air dan listrik, pelayanan umum kantor</i>	3 kegiatan		3		3		0	0	6		200	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.100		2.350		1.012	0	0		3.362		25,66
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis		2		0		0	0		2		100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			430.166		65.724		43.835	0	0		109.559		25,47
		Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	3 jenis		3		0		0	0		3		100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.580.293		368.811		195.367	0	0		564.178		35,7

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I	II	III	IV		9=5+6+7+8	10=11/6*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11		
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.		
		Jumlah jasa tenaga kontrak kebersihan dan peralatan kebersihan	1 paket	1	0	0	0	1	100			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.688.922	255.165	171.319	0	0	426.484	25		
		Jumlah gedung, kendaraan dinas/operasional, mebel, peralatan kantor yang terpeliharal	91 unit	0	49	0	0	49	53,85			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			437.510	49.633	29.059	0	0	78.692	17,99		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
					I		II		III		IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11				
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.				
	Lapangan													
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	50 unit	28	12	0	0	40	80					
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			28.940	0	750	0	0	750	2,59				
		Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	30 buah	0	1	0	0	1	3,33					
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.109.935	188.352	126.811	0	0	315.162	28,39				
		Jumlah gedung yang terpelihara	6 paket	0	1	0	0	1	16,67					
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			112.537	17.180	14.700	0	0	31.880	28,33				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.
		Jumlah sarpras kantor(peralatan kantor) yang terpelihara	18 jenis	3	6	0	0	9	50	
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			31.007.898	7.006.474	4.945.607	0	0	11.952.081	39
		Jumlah fasilitasi pakaian dinas yang disediakan, Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan dan layanan keuangan	3 kegiatan	1	0	0	0	1	33,33	
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			30.291.904	7.006.474	4.945.607	0	0	11.952.081	39,46
		Jumlah penerima gaji dan tunjangan DPRD	45 Orang	45	0	0	0	45	100	
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut			591.085	0	0	0	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
					I		II		III		IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	DPRD	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	245 stel		0		0		0		0		0	
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			124.909		0		0	0		0		0	0
		Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 orang		0		0		0		0		0	
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			689.476		23.392		44.399	0	0		67.791		10
		Jumlah fasilitasi kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	167 kali		0		24		0	0		24		14,37
X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			689.476		23.392		44.399	0	0		67.791		9,83

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket			
					I		II		III		IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
		Jumlah rapat yang terfasilitasi	214 kali		13		12		0	0	25				11,68		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			22.311.104	2.631.850	1.938.378	0	0	4.570.228	20,48							
		persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen		23		11		0	0	34				34		
4.02.02.2.01	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>			3.284.804	466.539	191.963	0	0	658.502	20							
		<i>Jumlah fasilitasi kunjungan kerja Bapemperda, pembahasan Perda dan Peraturan DPRD, pengkajian, penyusunan NA yang</i>	15 kali		6		3		0	0	9				60		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket	
					I		II		III		IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
		ranperda													
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			200.000		147.081		0	0	0		147.081		73,54	
		Jumlah dokumen produk hukum	4 dokumen		3	1		0	0		4		100		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			830.244		103.930		0	0	0		103.930		13	
		Jumlah fasilitasi kegiatan kunjungan kerja Badan Anggaran yang terealisasi	4 kali		1	1		0	0		2		50		
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			830.244		103.930		0	0	0		103.930		12,52	
		JumlahJumlah fasilitasi tugas	4 kali		1	1		0	0		2		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket		
					I		II		III		IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Badan Anggaran dalam/luar Propinsi														
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			7.621.010		720.593		758.682		0		0		1.479.276		19
		<i>pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan DPRD</i>	52 kali		1		16		0		0		28		53,85	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			1.651.390		135.549		175.628		0		0		311.177		18,84
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi A dalam/luar propinsi	13 kali		3		4		0		0		7		53,85	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan			2.151.005		202.994		210.433		0		0		413.427		19,22

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket			
			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		I		II		III				IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
		Jumlah fasilitasi tugas komisi C dalam/luar Propinsi	13 kali		3		4		0	0	7		53,85		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			2.005.831		206.420		168.929		0	0		375.350		18,71
		Jumlah fasilitasi tugas komisi D dalam/luar propinsi	13 kali		3		4		0	0	7		53,85		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			1.812.784		175.630		203.693		0	0		379.323		20,92
		Jumlah fasilitasi tugas komisi B dalam/luar propinsi	13 kali		3		4		0	0	7		53,85		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas			4.777.693		892.609		688.293		0	0		1.580.902		33

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11			
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.			
	DPRD												
		<i>Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD, Kegiatan yang dipublikasikan, Kegiatan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia, tenaga ahli fraksi yang tersedia</i>	232 kali	51	56	0	0	107	46,12				
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD		2.067.588	592.280	274.263	0	0	866.543	41,91				
		Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD	6 kali	2	2	0	0	4	66,67				
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		1.764.205	249.329	363.030	0	0	612.359	34,71				
		Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	258 kali	46	49	0	0	95	36,82				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket				
			I		II		III		IV						9=5+6+7+8		10=11/6*100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11								
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			597.900	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	8 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			348.000	51.000	51.000	0	0	102.000	29,31								
		Jumlah fasilitasi tenaga ahli fraksi yang tersedia	8 orang	8	0	0	0	8	100									
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			731.937	155.025	155.025	0	0	310.050	42								
		Jumlah fasilitasi kegiatan																

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
					I		II		III		IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11				
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.				
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Reses	12 kali	1	1	0	0	2	16,67					
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		63.600	0	0	0	0	0	0	0				
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah pengawasan DPRD sesuai dengan bidang tugas	10 kali	0	0	0	0	0	0	0				
		Jumlah kegiatan Reses	2 kali	1	1	0	0	2	100					
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		182.048	0	0	0	0	0	0	0				
		Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan yang terealisasi	4 kali	0	0	0	0	0	0					
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD		182.048	0	0	0	0	0	0	0				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I		II		III		IV				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar propinsi	4 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			4.883.368	293.154	248.345	0	0	541.499	11				
		Jumlah fasilitasi penyusunan Naskah,tugas,koordinasi,konsultasi Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD	89 kali	1 2	10	0	0	22	24,72					
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			1.911.568	0	0	0	0	0	0	0			
		Jumlah fasilitasi koordinasi,konsultasi Anggota DPRD dan alat kelengkapan dan pimpinan DPRD	18 kali	1	0	0	0	10	55,56					
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan			852.788	83.810	82.851	0	0	166.661	19,54				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		I		II		III		IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Musyawaharah	Jumlah kunjungan kerja Banmus dalam/luar propinsi	4 kali		1	1	0	0	2		50		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah kunjungan kerja Banmus dalam/luar propinsi		2.119.012	209.344	165.494	0	0	374.838		17,69		
		Jumlah fasilitasi penyusunan naskah, fasilitasi tugas, koordinasi, konsultasi Pimpinan DPRD	67 kali		10	12	0	0	22		32,84		
JUMLAH				71.156.968	11.668.139	8.558.965	0	0	20.227.104				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)										56,61	28,43		
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)	Ket
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=11/6*100	11
			K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Adanya koordinasi dan kerjasama antar bagian dan sub bagian untuk pencapaian target kinerja dan anggaran

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

Dinamika politik yang berkembang di DPRD sehingga kegiatan yang sudah terjadwal kadang tertunda

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

pertahankan capaian target kinerja sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya

agar penentuan target capaian kinerja dihitung secara matang agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai secara maksimal